

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Bernard Arief Sidharta, 2014, *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum dalam Pendulum Antinomi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bernard L. Tanya dkk., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Boedi Harsono, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional (dalam hubungan dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001)*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009, *Ensiklopedia Kraton Yogyakarta*, Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Elfrida R Gultom dan Markoni, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harun Al Rasyid, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturannya)*, Jakarta: Ghalia.
- Heine Gelderen, 1982, *Konsepsi tentang Negara dan Kedaulatan Raja di Asia Tenggara, terjemahan*, Jakarta: Rajawali.
- Imdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soebechi, 2010, *Judicial Review di Indonesia, Varia Peradilan Tahun XXVI*, Nomor 299, Oktober.
- Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Universitas Terbuka-Karunika.
- Soedikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Soemarsaid Moertono, 1985, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Hasa Lampau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Noermatif ,suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali.

Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

Andryan, “Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18 Nomor 3, (2018).

Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12 Nomor 2, (2018).

Eman Ramelan, “Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999”, *Jurnal Yuridika*, Volume 15 Nomor 3, (2000).

Endang Pandamdari, “Mengkritisi Diskriminasi Pemilikan Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1 Nomor 1, (2018).

Franky Satrio Darmawan, “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 2, (2018).

Hana Farah Dhiba, “Penerapan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (Asas Hierarki) dan Asas Timba Balik Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Politeknik Imigrasi*, Volume 1 Nomor 1, (2019).

- Muhammad Sujudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non Pribumi Untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik”, *Jurnal Forum Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM)*, Volume 1 Nomor 1, (2018).
- Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Andalas*, Volume 44 Nomor 4, (2015).
- Wagiman, “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya”, *Jurnal Filsafat Hukum*, Volume 1 Nomor 1, (2016).
- Widyarini Indriasti Wardani, “Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 10 Nomor 2, (2013).

Internet

- Nusantara Wordpress, ”Mengapa Timbul Pribumi dan Non Pribumi”, diakses dari <https://nusantaranews.wordpress.com/2008/11/30/pribumi-dan-non-pribumi>, pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 14.56.
- Ivan Lanin, “UU24/2009, Penerjemah, dan Juru Bahasa”, diakses dari <http://badanbahasa.kemendikbud.go.id/lamanbahasa/node/382>, pada tanggal 26 Februari 2019, pukul 23.30.
- Purnomo Iman Santoso, “Aturan dan Undang Undang Diskriminatif”, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/33264088/Aturan-UU-Diskriminatif>, pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 14.57
- Mawa Kesna, “Mengapa Non Pribumi Tidak Boleh Punya Tanah Di Yogyakarta?”, Diakses dari <https://tirto.id/mengapa-nonpribumi-tak-boleh-punya-tanah-di-yogya-bQZl>, pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 13.00.
- BBC, ”Larangan warga keturunan memiliki tanah di Yogyakarta: penggugat diancam akan diusir dari Yogyakarta”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43249299>, pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 15.00.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24C Ayat I Jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERMA No. 1 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

Surat Komnas HAM tertanggal 11 Agustus 2014 Nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014.

Surat BPN RI tertanggal 16 November 2011 Nomor 4325/016-300/XI/2011.